

EDISI 13/DESEMBER 2021

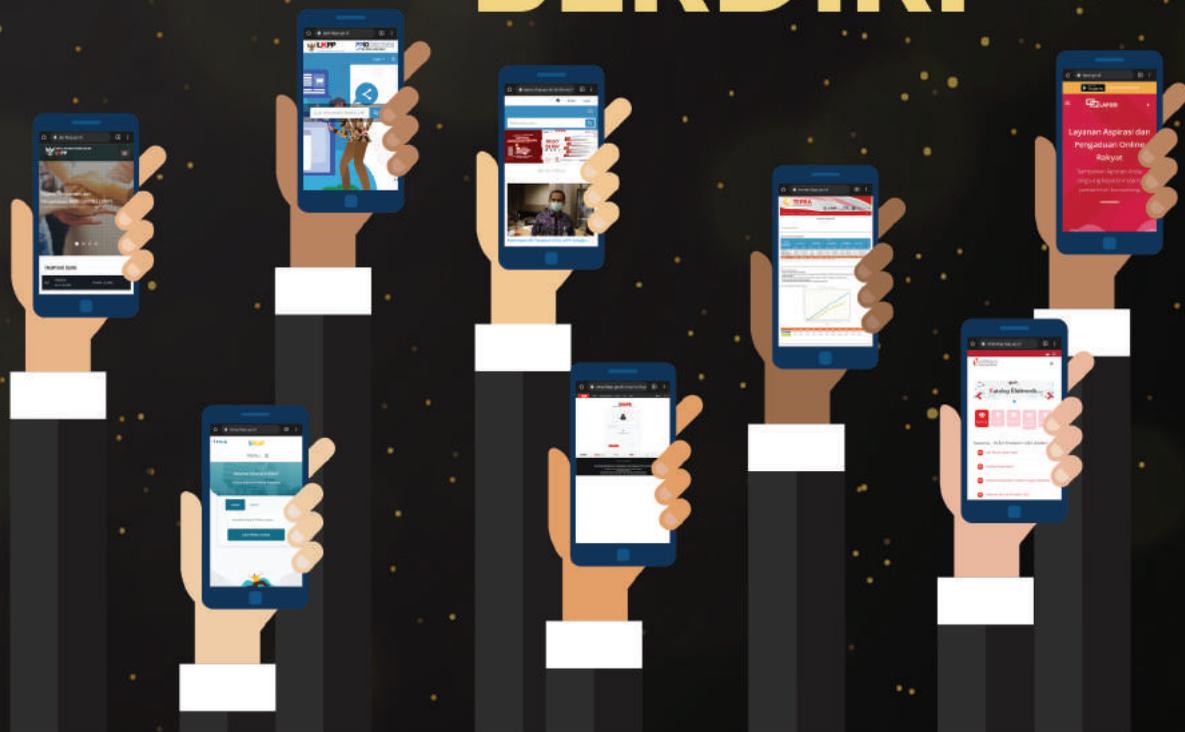
KREDIBEL

MAJALAH PENGADAAN INDONESIA



SIMBOLISASI LKPP 14 TAHUN BERDIRI

Diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)



KILAS PERISTIWA
KILAS BALIK LKPP

FOKUS
PENGADAAN TANGGUH
UNTUK UMK TUMBUH

SEHAT
MENJAGA KONDISI TETAP SEHAT
DI KALA PANDEMI COVID-19



bela pengadaan

LKPP menghadirkan Bela (Belanja Langsung) Pengadaan, sebuah inovasi belanja pengadaan yang memfasilitasi pengadaan langsung barang/jasa yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD dengan nilai transaksi di bawah Rp50 juta.

Platform Bela Pengadaan merupakan bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) sebagai upaya pemerintah menanggulangi dampak Covid-19 terhadap kegiatan perekonomian UMKM.

Dalam aplikasi tersebut, terdapat enam kategori produk yang bisa dikerjasamakan yakni angkutan, makanan, kurir, souvenir, dan alat tulis kantor. Semua transaksi yang dilakukan di *platform* ini bisa dipantau berkala melalui fitur riwayat transaksi.

LKPP bekerjasama dengan sejumlah *marketplace* menghadirkan program Bela Pengadaan yang menawarkan kemudahan dalam belanja pemerintah serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Saat ini terdapat 13 *marketplace* yang telah bergabung dalam Bela Pengadaan yaitu Bhinneka, Blibli, BukaPengadaan, Grab, Gojek, Shopee, Mbiz, Balimall, Kartara, Digitalimaji, Kulina, Indotrading, dan klikMRO yang menyediakan berbagai keperluan pemerintah.

DAFTAR ISI

3 DAFTAR ISI

4 SALAM REDAKSI

PRIMERA

5 HUT LKPP Ke-14, Momentum Penguatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Momentum reformasi besar-besaran yang terjadi di era 1998 tampaknya menjadi penggerak utama metamorfosis sistem pengadaan barang/jasa Indonesia.

KILAS PERISTIWA

9 Kilas Balik LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014.

FOKUS

13 Pengadaan Tangguh untuk UMK Tumbuh

Pemerintah menaruh perhatian terhadap keberlangsungan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi di Indonesia.

PROFIL UMK

15 UMK Bicara Soal Pengalaman Bertransaksi dengan Pemerintah

16 PROCUREPEDIA

TANYA JAWAB

18 Sutan Suangkupon Lubis Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Penguatan SDM dan Kelembagaan PBJ LKPP



13



20



21

TOKOH BANGSA

20 Kesederhanaan dan Pemikiran Pendiri Bangsa

SEHAT

21 Menjaga Kondisi Tetap Sehat di Kala Pandemi Covid-19

ETALASE

22



6

KREDIBEL

Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B,
RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940



Edisi 13 • Desember 2021

Diterbitkan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP)
www.lkpp.go.id

Pelindung:

Sarah Sadiqa

Pengarah:

Robin Asad Suryo

Pemimpin Redaksi:

Shahandra Hanitiyo

Penyunting:

Dodi Wahyugi

Redaksi:

Mukti Her, M. Farizqi, Gunawan S. Arif,
Ajeng Widi, Anita Rachmawati, Puspita
Dwiputri

Desain & Layout:

Tim Bisnis Indonesia

Fotografer:

Taufan Juli
Teguh Setiarso
Ria Widya

Salam Redaksi



Dunia terus bergerak maju dan kita bersama terus bergerak mengikuti, begitu juga dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang terus beradaptasi mencari bentuk terbaik bagi semua insan pengadaan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai pedoman dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berintegritas.

Adanya pandemi telah mengubah aktivitas kerja kita semua selama hampir dua tahun terakhir ini, namun itu semua tidak menghalangi kita untuk tetap berkarya dan berkontribusi untuk negeri. LKPP tetap terus berkomitmen melaksanakan pendampingan pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama pada proses pengadaan proyek kegiatan strategis nasional.

Integritas pelaku pengadaan semoga senantiasa terpelihara dengan baik, sehingga dukungan, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadaan dapat terus terjaga. LKPP akan terus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan mengawal pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersih di Indonesia.

14 tahun rangkaian perjalanan LKPP, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus berkontribusi membangun negeri.

Salam pengadaan!

Sarah Sadiqa
Pelindung

HUT LKPP ke-14, Momentum Penguatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Momentum reformasi besar-besaran yang terjadi di era 1998 tampaknya menjadi penggerak utama metamorfosis sistem pengadaan barang/jasa Indonesia. Semangat reformasi yang mengedepankan transformasi dan transparansi membuat semua lembaga pemerintah merombak besar-besaran birokrasinya untuk mendukung hal tersebut.



Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dulunya hanya menguntungkan segelintir pihak didorong untuk lebih bersifat inklusif. Dari yang mulanya hanya sebuah belanja rutin, pengadaan barang/jasa mulai menjelma sebagai pilar yang sistematis dalam mendukung operasionalisasi sebuah lembaga.

Kebutuhan tersebut akhirnya melahirkan sebuah unit kerja bernama

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II pada 2005. Unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan

pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Dulu dari unit kecil di Bappenas, bikin-bikin lembaga. Lembaganya berdiri yang diboyong [seperti LKPP saat ini]. Ini merupakan perjalanan yang panjang, kita mendapatkan momentum di tahun 1999-2000. LKPP mendapatkan momentum kita harus memperbaiki sistem





keuangan kita, memperbaiki sistem pengawasan kita, *good governance* kita,” kata mantan Deputy Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggal LKPP Ilkak G. Patriastomo, Kamis (25/11/2021).

Melihat kebutuhan tersebut, akhirnya pemerintah membentuk LKPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 pada 6 Desember 2007. Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Selain Indonesia, sejumlah negara sudah memiliki lembaga dengan fungsi serupa yakni Office of Federal Procurement

Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.

LKPP lahir untuk membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak.

“Saya membandingkannya tidak 5 tahun yang lalu, tapi 20 tahun yang lalu. Sangat jauh kalau dibandingkan

dengan itu, lebih transparan, lebih efisien, tapi juga hari ini lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan. Dulu pertanggungjawaban formalitas saja, menyedihkan sih kalau melihat awal-awal gagasan reformasi pengadaan,” jelasnya.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggung jawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Inklusif

Ikak menjelaskan perjalanan LKPP tidak berhenti hanya di sini saja karena tantangannya saat ini diakuinya makin kompleks. Sesuai dengan visinya, LKPP berkomitmen untuk menciptakan persaingan yang sehat di antara para penggunanya, baik dari lembaga swasta maupun kementerian/lembaga pemerintah lainnya. Pasalnya, belanja barang/jasa pemerintah merupakan salah satu fungsi penting dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

“Bagaimana keterlibatan pelaku usaha di dalam pengadaan kita, berapa sih total penyedia yang sudah terlibat. mestinya jumlah penyedia makin lama makin besar. Hari ini persaingan jauh lebih efektif daripada yang lalu-lalu. Mudah-mudahan dengan persaingan

lebih efektif, pelaku usaha yang terlibat naik,” jelasnya.

Merujuk data Monev LKPP, sejak lima tahun terakhir prosentase belanja pengadaan telah mencapai 50 persen dari total anggaran APBN. Dari APBN sebesar Rp2.255 triliun, sebanyak Rp1.118,2 triliun merupakan anggaran belanja pengadaan. Dari nilai anggaran tersebut, sebanyak Rp325,9 triliun atau 15 persen dialokasikan untuk UMK, dan sebesar Rp523,3 triliun untuk PDN.

Keberpihakan pemerintah terhadap konsep inklusifitas ini juga tecermin dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Perubahan ini didorong atas terbitnya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan baru tersebut, pemerintah menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp2,5 miliar.

Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada UMK dan koperasi, kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) juga diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 40 persen anggaran belanja dengan memprioritaskan penggunaan produk/jasa usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi wilayah setempat. K/L/PD juga didorong untuk memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/ jasa mereka ke dalam katalog elektronik.

Digitalisasi

Pengadaan saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Berdasarkan data SPSE, total belanja pengadaan barang/ jasa pemerintah 2020 adalah sebesar Rp1.027,1 Triliun. Dengan sistem elektronik dan SDM pengadaan yang semakin



Ikak G. Patriastomo

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian
Sangah LKPP Periode 2013 - 2021

PRIMERA

baik kompetensinya, pemerintah mampu menghemat Rp90 triliun melalui *e-tendering* dan *e-purchasing*.

Selain itu, LKPP juga melakukan kolaborasi teknologi dengan K/L/PD melalui integrasi sistem, seperti OSS BKPM untuk data perijinan usaha, Kementerian Keuangan untuk data Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk data Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

"Hari ini, kita punya *tools* atau sistem untuk memberi gambaran hari ini, minggu ini tanggal ini posisi pengadaan pemerintah sampai dimana. Itu suatu pencapaian luar biasa dari sisi data saja. Setiap instansi posisinya gimana, progres pengadaannya gimana, itu kita punya, itu sesuatu yang sangat penting," tambahnya.

Sejak tahun lalu, LKPP juga sudah meluncurkan sebuah *platform* yang diberi nama Program Bela Pengadaan. Inovasi ini merupakan bagian dari gerakan #banggabuatanindonesia sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap kegiatan perekonomian khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Platform ini memfasilitasi pengadaan langsung barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD dengan nilai transaksi di bawah Rp50 juta. Dalam aplikasi tersebut, terdapat enam kategori

Sejak tahun lalu, LKPP juga sudah meluncurkan sebuah *platform* yang diberi nama Program Bela Pengadaan. Inovasi ini merupakan bagian dari gerakan #banggabuatanindonesia sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap kegiatan perekonomian khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil.

produk yang bisa dikerjasamakan yakni angkutan, makanan, kurir, souvenir, dan alat tulis kantor.

Saat ini terdapat 13 *marketplace* yang telah bergabung dalam Bela Pengadaan yaitu Bhinneka, Blibli, BukaPengadaan, Grab, Gojek, Shopee, Mbiz, Balimall, Kartara, Digitalimaji, Kulina, klikMRO, dan Indotrading yang menyediakan berbagai keperluan pemerintah. Tak hanya itu, Program Bela Pengadaan sudah melibatkan 71 K/L/PD.

Sepanjang 2008-2020, sekitar 47 persen atau 180.000 UKM sudah berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik. Adapun, nilai pengadaan elektronik melalui UKM mencapai Rp56 triliun atau 26 persen dari nilai total transaksi pengadaan secara elektronik pada 2020.

Inovasi dari sisi teknologi juga dimanfaatkan LKPP untuk mengembangkan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk menyajikan

data pengadaan mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, kontrak, hingga serah terima pekerjaan dan pembayaran.

Melalui AMEL, data proses pengadaan barang/jasa hingga pembayaran pekerjaan dapat terintegrasi. Selain itu, pengolahan data pelaporan pengadaan, dan monitoring realisasi anggaran dapat dilakukan secara *online* dan *realtime*. Hasilnya, seluruh kinerja pelaksanaan pengadaan dapat dipantau secara lebih mudah.

Namun, Ikak menegaskan sistem pengawasan juga harus dilakukan secara paralel dengan melibatkan masyarakat. "Ini yang kita perlu menggerakkan masyarakat secara umum untuk ikut awasi, itu hari ini dimungkinkan. Keterlibatan ICW [Indonesia Corruption Watch] untuk mengawasi sudah terjadi, tapi ICW punya masalah *resource*, jadi harus menggalang teman-teman yang lain ikut mengawasi," ujarnya. (*)

Kilas Balik LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014.




 Dalam praktiknya, LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Sejarah LKPP berawal dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II pada 2005. Unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan

barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sejak lepas dari Bappenas dan disahkan sebagai lembaga baru setingkat menteri pada 2007, LKPP tercatat pindah gedung selama dua kali. Pada awal pendiriannya, LKPP menempati Gedung Bakrie II di daerah Kuningan. Setelah genap setahun, LKPP kemudian berpindah kantor

di Gedung SME Tower di Jl. Gatot Soebroto pada awal 2009.

Selasa, 8 Desember 2015 merupakan momen yang cukup bersejarah bagi perjalanan LKPP di Indonesia. LKPP secara resmi menempati gedung baru yang terletak di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan.

Gedung baru LKPP akan menampung seluruh kegiatan seperti yang selama ini dilakukan diantaranya konsultasi pengadaan, *troubleshooting* LPSE, pelayanan masyarakat, negosiasi kontrak e-katalog, ujian sertifikasi, dan

KILAS PERISTIWA

kegiatan administrasi lainnya. Ketersediaan fasilitas yang lebih memadai diharapkan dapat memudahkan LKPP dalam memberikan layanan yang lebih prima.

Gedung LKPP memiliki 13 lapis lantai, terdiri atas dua lapis *basement*, 1 lapis *ground*, 1 lapis *mezzanine*, 1 lapis untuk aula, ruang ujian dan *training* LPSE, serta 8 lantai lainnya yang digunakan untuk ruang kerja. Adapun, gedung baru LKPP menjadi salah satu gedung pemerintah yang berkarakter kuat dan khas dengan bentuk segitiga yang berwarna dasar biru.

Pembangunan gedung LKPP dimulai pada 2012 melalui sayembara desain arsitektur gedung. Pemenang sayembara adalah Ardi Jahya dari PT Airmas Asri dan mendapatkan hadiah senilai Rp400 juta dan terbesar sepanjang penyelenggaraan sayembara pemerintah.

Gedung LKPP menempati lahan seluas 4.709 m² di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B bersebelahan dengan Gedung ANTV. Nilai pagu konstruksi bangunan Rp123 miliar dan dilelang secara elektronik dengan pemenang PT Waskita Karya yang dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT Gitarencana Multiplan dan PT Cakra Manggilingan Jaya sebagai Konsultan Perencana.

Menginjak usianya ke-14 tahun, LKPP telah melalui perjalanan transformasi yang cukup panjang, mulai dari sisi kelembagaan, infrastruktur fisik, hingga pengembangan layanan dan sistem pengadaan.

"Kita [LKPP] masih muda, Korea Selatan tahun 1949 sudah punya [lembaga pengadaan]. Selain masih muda, LKPP perlu dibantu ekosistem lainnya. [Misalkan] oleh aturan di Kementerian Keuangan, aturan

di Kementerian Dalam Negeri sehingga kalau ekosistemnya sudah ideal, maka pengadaan di Indonesia akan semakin cepat. Yang namanya pengadaan, bukan hanya urusan LKPP, pajaknya ada, keuangan negara, kelembagaan, pidananya ada," kata Kepala LKPP periode 2015-2018 Agus Prabowo.

Salah satu fungsi LKPP adalah untuk merumuskan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi, diantaranya adalah SPSE, e-katalog, *e-purchasing*, dan e-monev, serta Pengembangan SDM Pengadaan, membina pelaku usaha dan membantu penyelesaian permasalahan pengadaan.

"Layanan pertama [LKPP] itu e-katalog. Kayak Tokopedia, sebelum Tokopedia ada, tahun 2013 sudah ada LKPP. Kita juga punya layanan pengadaan,



gratis lagi. Kalau ada sengketa, kita menengahi dan ini gratis,” tekannya.

Menurutnya, transformasi LKPP juga bisa dilihat dari segi pelayanannya. Hal itu bisa dilihat dari perubahan pelayanan menjadi elektronifikasi. “Yang tadinya serba manusia, masukkan pengadaan harus pakai dokumen, [sekarang] ke elektronik. Sekarang baru transformasi ke digital,” jelasnya.

Capaian Renstra LKPP Tahun 2020

LKPP terus bekerja dan berupaya untuk dapat mencapai target-target yang telah ditentukan dan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) LKPP Tahun 2020-2024 di tengah tantangan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama Renstra LKPP periode 2020-2024. Tercatat bahwa upaya-upaya LKPP yang dilakukan telah menghasilkan capaian kinerja yang melebihi target. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020 yang disusun sebagai transparansi dan akuntabilitas kinerja LKPP.

Penetapan visi dan misi LKPP bertujuan untuk mewujudkan dua tujuan strategis. Pertama, terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan. Kedua, meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP.

Pada tahun lalu, LKPP mencatat persentase penggunaan PDN dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah sebesar 68,29 persen atau Rp267,4 triliun dari total transaksi PBJP secara elektronik yang tercatat dalam aplikasi SPSE dan katalog elektronik yang sebesar Rp391,5 triliun.

Selain itu, persentase nilai transaksi UMKM terhadap rencana umum pengadaan pada tahun lalu adalah sebesar 26,81 persen atau sebesar Rp130,6 triliun dari total belanja pengadaan pemerintah yang diumumkan pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebesar Rp487,2 triliun.

LKPP juga melakukan pengukuran kualitas kebijakan Indeks kualitas kebijakan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yaitu melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), kebijakan tersebut mendapatkan nilai indeks kualitas kebijakan sebesar 72,692.

Dalam meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pengadaan yang terdiri dari pemanfaatan sistem pengadaan, peningkatan profesionalisme pengelola PBJP, dan pembentukan UKPBJ dengan level maturitas 3 (proaktif), LKPP tidak berhenti berupaya untuk meningkatkan tata kelola tersebut di K/L/PD.

LKPP menyatakan pada 2020, sebanyak 245 K/L/PD telah memanfaatkan sistem pengadaan yang terintegrasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak

66 K/L/PD telah menerapkan 90 persen proses pemilihan melalui tender, seleksi, tender cepat, dan e-Purchasing.

Terkait dengan tata kelola kelembagaan, capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) LKPP pada 2020 berturut-turut adalah sebesar 75,09 atau dalam kategori “BB” dan kategori “B”. Sebaliknya untuk Opini BPK terhadap Laporan Keuangan LKPP, selama tiga tahun berturut-turut atau sejak 2017 hingga 2019, Laporan Keuangan LKPP mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Tantangan

Menurut data Kinerja Pengadaan LKPP Per 17 Mei 2021, anggaran belanja pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) pemerintah daerah TA 2021 adalah sebesar Rp606,6 triliun serta sebanyak Rp586,1 triliun sudah diumumkan dalam SiRUP. Ini artinya, 97 persen total anggaran belanja PBJP Pemda sebenarnya sudah bisa dilihat dan dikompetisikan oleh para pelaku usaha. Namun dari anggaran tersebut baru terealisasi Rp43,8 triliun atau 8 persen.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti rendahnya realisasi anggaran belanja pemerintah daerah. Presiden kemudian meminta pemerintah daerah untuk lebih mempercepat belanja agar target pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tercapai.

Untuk itu, LKPP dan Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 11 Mei 2021.

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah tren belanja masih belum menunjukkan perbaikan kualitas yang signifikan. Data LKPP menunjukkan nilai belanja pengadaan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan, tetapi yang diumumkan melalui aplikasi SiRUP dan nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan oleh K/L/PD belum mencapai 100 persen.

Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan yang mendekati akhir tahun berjalan akan menyebabkan penumpukan 2 bulan terakhir, akibatnya kualitas pekerjaan buruk dan bahkan bisa berdampak pada wanprestasi.

“Yang paling sensitif adalah tidak seimbang nya tanggung jawab dengan insentif atau risiko bagi insan pengadaan. Coba kalau insan pengadaan dikasih insentif seperti orang pajak, tanggung jawabnya pasti meningkat. Berat lho menjadi anak pengadaan, gampang masuk penjara tapi kalau dia sukses gak ada yang memuji,” tekan Agus.

Dia pun menambahkan tantangan lain terkait menahunnya problem pengadaan adalah alur birokrasi yang lambat. Menurutnya, LKPP sebagai sebuah

Tabel Perkembangan Belanja Negara dan Belanja Pengadaan dalam Kurun Waktu 2017-2020 (dalam triliun Rupiah)

No	Deskripsi	tahun			
		2017	2018	2019	2020
A	Belanja Negara	2.007,4	2.217,3	2.461,1	2.540,4
	1. Belanja Pemerintah Pusat	1.265,4	1.453,6	1.634,3	1.683,5
	2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	742,0	763,6	826,8	856,9
B	Belanja Pengadaan	1.039	1.117,5	1.168,4	1.027,1
C	Nilai Belanja Pengadaan yang Diumumkan di SiRUP	864	824,9	939,4	811,8
D	Nilai Realisasi Pengadaan berdasarkan realisasi pagu pengumuman di SiRUP	396	412,9	412,5	291,7

Sumber: Buku Informasi APBN Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Buku Profil Pengadaan Tahun 2017-2019 serta data pengadaan barang/jasa per tanggal 12 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh LKPP

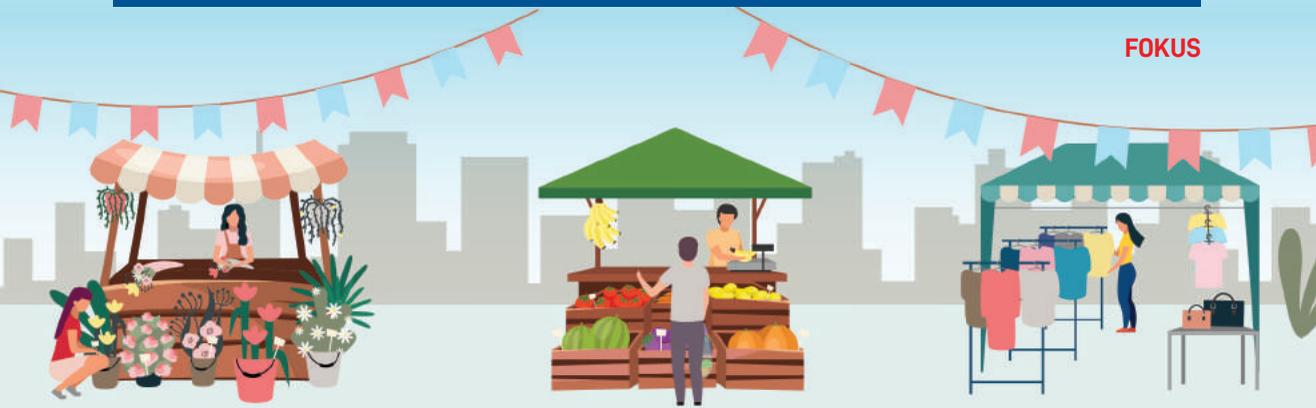
organisasi bisa dianalogikan sebagai medium antara pemasok dengan kementerian atau pemerintah daerah. Layaknya praktik yang selama ini dilakukan oleh Gojek, perusahaan ini mempertemukan antara permintaan dan pemasok jasa.

“Saya membayangkan kalau LKPP bisa kayak Gojek. Cepet banget, barang dipesan, langsung datang. Kebayang kalau pengadaan pemerintah kayak gitu, cepet banget. Kementerian ini butuh *bulldozer*, obat, pencet-pencet, langsung bayar di situ. Ke depan harus begitu, orang kita beli apa-apa di Tokopedia, Lazada, itu kan pengadaan,” ujarnya.

Sayangnya, dia mengemukakan birokrasi

pemerintah saat ini belum menganut konsep *cash and carry*. Artinya, barang atau manfaat harus diterima lebih dahulu, lalu dokumen terkait harus dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sehingga lembaga itu yang akan membayarnya ke pemasok.

Peran kualifikasi SDM juga tidak kalah penting untuk mendukung tata kelola LKPP makin profesional ke depannya. LKPP berupaya untuk membentuk SDM pengadaan barang/jasa yang kompeten dan profesional. Semula, pengadaan cenderung bersifat *clerical job*. Tetapi saat ini, pengadaan sudah menjelma menjadi ilmu manajerial. (*)



Pengadaan Tangguh untuk UMK Tumbuh

Pemerintah menaruh perhatian terhadap keberlangsungan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi di Indonesia.



Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM kepada PDB sebesar 60 persen dengan serapan tenaga kerja hingga 97 persen. Adapun jumlah pelaku UMKM sebesar 99,8 persen atau 64,19 juta orang dimana dari jumlah itu sebanyak 64,14 juta adalah usaha mikro kecil.

Dalam hal ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) menjadi salah satu perpanjangan tangan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekosistem UMKM di Indonesia. Di tengah keterbatasannya, pemanfaatan teknologi di era digital dapat mendukung percepatan pertumbuhan di sektor ini.

Salah satu wujud keberpihakan tersebut dapat dilihat dari platform digital yang dihadirkan LKPP untuk pengembangan UMKM. LKPP menghadirkan Bela Pengadaan, sebuah inovasi belanja pengadaan yang memfasilitasi pengadaan langsung barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD dengan nilai transaksi sampai Rp50 juta.

Platform belapengadaan merupakan bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) sebagai upaya pemerintah menanggulangi dampak Covid-19 terhadap kegiatan perekonomian UMKM.

Dalam inovasi tersebut, terdapat enam kategori produk yang bisa

dimanfaatkan yakni angkutan, makanan, kurir, souvenir, dan alat tulis kantor. Semua transaksi yang dilakukan di platform ini bisa dipantau secara berkala melalui fitur riwayat transaksi.

LKPP juga menyediakan laman untuk pelaku UMKM dalam portal pengadaan nasional atau inproc.id/UKM. Laman ini dikembangkan untuk mendukung peningkatan UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sepanjang 2008-2020, sekitar 47 persen atau 180.000 UKM sudah berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik. Adapun, nilai pengadaan elektronik

melalui UKM mencapai Rp56 triliun atau 26 persen dari nilai total transaksi pengadaan secara elektronik pada 2020.

Selain dari sisi teknologi, pemerintah juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi UMKM dari sisi regulasi. Hal ini dapat dilihat dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didorong atas terbitnya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan baru tersebut, pemerintah menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp2,5 miliar.

Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar.

Tak hanya itu, kementerian/ lembaga/pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 40 persen anggaran belanja dengan memprioritaskan penggunaan produk/jasa usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi wilayah setempat.

Merujuk data Monev LKPP, sejak lima tahun terakhir prosentase belanja pengadaan telah mencapai 50 persen dari total anggaran APBN. Dari APBN



sebesar Rp2.255 triliun, sebanyak Rp1.118,2 triliun merupakan anggaran belanja pengadaan. Dari nilai anggaran tersebut, sebanyak Rp325,9 triliun atau 15 persen dialokasikan untuk UMK, dan sebesar Rp523,3 triliun untuk PDN.

Selanjutnya, data hingga 27 Sept 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 1.990 juta paket telah disediakan untuk usaha kecil. Sayangnya, paket sebanyak itu hanya diperebutkan oleh 175.065 pelaku UMK yang terdaftar di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Penguatan SDM UMKM

Penguatan UMKM juga dilakukan melalui pelatihan bagi pelaku usaha tersebut. Hal itu dapat dilihat dari peluncuran *Massive Open Online Course* (MOOC) yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi agar pelaku UMKM bisa berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Pelatihan yang sebelumnya 100 persen dilakukan secara tatap muka, kini mulai bergeser menjadi tatap muka dan virtual

sehingga saat ini dikenal sebagai MOOC. Cukup banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui MOOC antara lain pembelajaran yang dilakukan secara massif, dapat diakses banyak orang, terbuka bagi semua yang memiliki akses ke dalam *platform* pembelajaran MOOC, dan diakses secara daring sehingga tidak dibatasi ruang dan waktu.

Sekretaris Utama LKPP Robin Asad Suryo menyampaikan MOOC bagi pelaku UMKM bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM dan Koperasi terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP).

"Tentunya kita perlu melihat hambatan apa saja yang dihadapi oleh UMK di Indonesia. Melalui peningkatan kompetensi melalui MOOC, kita berharap para pelaku UMK nantinya memiliki kapabilitas, memahami gambaran umum PBJP, mampu berpartisipasi dalam pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan memahami pengenalan Aplikasi PBJP," katanya, dikutip dari laman resmi LKPP, Kamis (11/11/2021). (*)

UMK Bicara Soal Pengalaman Bertransaksi dengan Pemerintah

Pemerintah harus mengakui pengadaan barang/jasa pemerintah hingga saat ini masih diganjar stigma negatif oleh masyarakat termasuk pelaku usaha. Terlebih pandemi Covid-19 menambah kesulitan para pelaku usaha untuk bertransaksi dengan pemerintah, tidak terkecuali usaha mikro dan kecil (UMK).

Inovasi di Tengah Pandemi

Sofia Agustina Pemilik Sate Maranggi Rumah Enin mengaku harus memutar otak untuk tetap mempertahankan usaha yang telah dirintis keluarganya sejak lama.

"Sate Maranggi ini adalah inovasi yang kami bangun, karena *basic* usaha kami adalah kambing guling yang biasa kami suplai ke hotel, pernikahan dan akikah. Sate Maranggi ini adalah upaya kami untuk bisa ada pemasukan harian, karena sate bisa dikonsumsi setiap hari," ujar Sofia.

Selain membuat produk baru, Sofia mengatakan pemanfaatan *marketplace* menjadi salah satu upaya untuk lebih dekat dengan konsumen. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan cukup memesan melalui aplikasi yang ada.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Steven pemilik Healthy Juice ID yang menjual produk minuman kesehatan. "Kami memasukkan produk kami di *marketplace* seperti Gofood, Grabfood, dan Shopee Food. Untuk

memudahkan konsumen dalam memperoleh jus yang sehat yang kami produksi," kata Steven saat ditemui di Mall ITC Kuningan pada Agustus 2021.

Pengalaman Bertransaksi dengan Pemerintah

Upaya para pelaku usaha untuk masuk ke dalam ekosistem digital merupakan bagian dari program UMK Go Digital. Hal tersebut diungkapkan oleh Fachrizal Alief, pemilik Rumah Makan Kapau Langganan di Kemang. "Selama ini, melalui *marketplace* banyak instansi pemerintah yang beli di kami (Kapau Langganan) seperti Kemenkeu pernah, Kemenkes pernah, LKPP pernah, Kemendikbud pernah," ungkap pria yang akrab disapa Rizal ini.

Rizal juga mengungkapkan saat ini bertransaksi dengan pemerintah itu sangat mudah. Ia mengungkapkan tidak pernah ada pembayaran yang macet. Bahkan saat barang diterima, pelaku UMK akan mendapatkan pembayaran secara langsung. (*)



PPMSE	<p>PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) jo. Pasal 1 PP 80/2019 PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Pihak yang menjadi PPMSE juga dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri.</p>
Beda toko daring dan e-katalog	<p>Perbedaan Katalog Elektronik dan Toko Daring terletak pada proses akurasi dan verifikasi. Pada Katalog Elektronik yang mengakurasi dan memverifikasi adalah pengelola katalog, yaitu LKPP untuk Katalog Nasional, Kementerian untuk Katalog Sektoral dan Pemda untuk Katalog Lokal. Sedangkan pada Toko Daring yang melakukan kurasi harga adalah <i>marketplace</i>. Nantinya Katalog Elektronik diarahkan untuk barang/jasa yang sifatnya strategis dan terbatas.</p>
Agen Pengadaan	<p>Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.</p>
Model kematangan UKPBJ	<p>Model Kematangan UKPBJ yang selanjutnya disingkat MK-UKPBJ adalah instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya meningkatkan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.</p>
E- Marketplace	<p>E-<i>marketplace</i> Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.</p>
JF Pengelola PBJ	<p>Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/jasa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.</p>
Program MOOC	<p>MOOC adalah program pelatihan yang memiliki karakteristik <i>massive</i> (kapasitas yang masif dapat diakses oleh banyak orang), <i>Open</i> (terbuka bagi semua orang yang memiliki akses ke dalam <i>platform</i> MOOC), <i>Online</i> (Dapat diakses kapanpun dan dimanapun sepanjang terdapat akses internet, <i>Course</i> (disajikan dalam format pembelajaran sehingga memiliki alur yang sistematis. MOOC merupakan transformasi pembelajaran dari pembelajaran tatap muka - <i>blended learning- Full online</i>.</p>
Clearing House	<p><i>Clearing House</i> Pengadaan adalah Forum untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan, sehingga dapat memberi solusi yang komprehensif.</p> <p>Tujuan <i>Clearing House</i> Pengadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pengambilan keputusan secara komprehensif, efektif, dan transparan. 2. Meningkatkan kapabilitas dan kemandirian K/L/PD dalam penyelesaian permasalahan pengadaan. 3. Mengurangi risiko terjadinya sengketa, pengaduan, sengketa, dan/atau permasalahan hukum. 4. Menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan.

TKDN atau Tingkat Kemampuan Dalam Negeri, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

Dalam membantu program Pemerintah mengoptimalkan TKDN, maka sektor-sektor tertentu wajib memiliki TKDN dengan penetapan nilai persentase yang sudah diperhitungkan.

TKDN

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Pengadaan Berkelanjutan

Aspek berkelanjutan terdiri dari:

- a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
- b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
- c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PROCURE PEDIA

Sutan Suangkupon Lubis

Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP

Penguatan SDM dan Kelembagaan PBJ LKPP



Penguatan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). LKPP memiliki serangkaian program dan strategi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperbaiki tata kelola kelembagaan PBJ.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai revolusi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan PBJ yang dilakukan LKPP, berikut petikan wawancara Majalah Kredibel dengan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Sutan Suangkupon Lubis.

Bagaimana kondisi sumber daya manusia (SDM) PPBJ dan UKPBJ saat ini dibandingkan dengan awal pembentukan LKPP?

Kondisi SDM PBJ di awal pembentukan LKPP mengalami perubahan sangat signifikan dibandingkan dengan kondisi saat ini. Misalnya saja, SDM PBJ masih bekerja secara adhoc atau paruh waktu sebagai Pokja/PP/PPK. Tetapi dengan adanya PermenPANRB No. 29/2020, Pokja/ PP wajib bekerja secara penuh.

Selain itu, dulu SDM PBJ masih belum memiliki standar kompetensi dan tidak memiliki

jenjang karir yang jelas. Tetapi saat ini, SDM PBJ sudah memiliki standar kompetensi dan jenjang karir sebagai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa (JF PPBJ).

Saat ini juga sudah ada dasar hukum yang jelas untuk pemberian insentif JF PPB, yakni Tunjangan fungsional, TPP (Pemda), dan honor kelebihan paket (K/L).

Bagaimana kondisi kelembagaan PBJ saat ini dibandingkan ketika di awal pembentukan LKPP?

Ketika awal pembentukan LKPP, kelembagaan PBJ masih

bersifat adhoc (berbentuk ULP) sehingga PBJ dilaksanakan oleh unit kerja sebagai tugas tambahan. Tetapi, dengan sejumlah perubahan regulasi terkait kelembagaan tersebut, terdapat amanat pembentukan UKPBJ secara struktural.

Dengan demikian, saat ini sudah ada unit kerja struktural yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam melaksanakan PBJ di K/L/Pemda. Hingga November 2021 ini, sudah terdapat 514 K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ struktural dari 617 K/L/Pemda yang menjadi target pembentukan UKPBJ struktural.

Perubahan lainnya adalah pembentukan UKPBJ struktural setiap K/L/Pemda secara terpusat, sehingga hanya ada 1 UKPBJ di setiap K/L/Pemda. Sebelumnya, ULP masih tersebar di unit-unit kerja K/L/Pemda sehingga rawan intervensi.

Sesuai amanat Perpres 12/2021 dan Peraturan LKPP 10/2021, juga telah dilakukan program peningkatan kapabilitas UKPBJ menuju Pusat Keunggulan PBJ melalui instrumen Model Kematangan UKPBJ. Sebelumnya, belum ada instrumen peningkatan kapabilitas kelembagaan.

Upaya apa saja yang sudah dilakukan LKPP dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM PPBJ dan meningkatkan kematangan UKPBJ?

Untuk meningkatkan kompetensi SDM PBJ /JF, PPBJ LKPP sudah menyusun Kamus Kompetensi Teknis PBJ dan Standar Kompetensi JF PPBJ

yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum/modul pelatihan dan pelaksanaan asesmen SDM PBJ/JF PPBJ.

Selain itu, SDM PBJ terutama JF PPBJ juga mempunyai kewajiban mengikuti pelatihan. Merujuk pada PermenPANRB No.29/2020, JFPPBJ formasi CPNS wajib mengikuti Pelatihan Penjurangan Pertama. Jika Pengelola PBJ yang akan naik jenjang tidak memiliki portofolio untuk uji kompetensi, maka mereka harus mengikuti Pelatihan Penjurangan untuk mendapatkan pengganti portofolio.

Peningkatan kematangan UKPBJ dilakukan dalam kerangka peningkatan kapabilitas UKPBJ. Untuk mendorong UKPBJ dapat meningkatkan kematangannya, telah ditetapkan SE Deputi PPSDM LKPP No. 17/2019 tentang Contoh Bukti Dukung Tingkat Kematangan UKPBJ Proaktif.

Salah satu wujudnya adalah telah disiapkannya aplikasi

SIMKU untuk memudahkan para UKPBJ melakukan penilaian mandiri, menyusun peta jalan dan rencana aksi untuk meningkatkan kematangannya. Aplikasi SIMKU juga bisa menjadi sarana komunikasi dengan tim pembina wilayah karena terdapat fitur diskusi dan konsultasi.

Berapa jumlah pemegang sertifikat PBJ dan bagaimana upaya menjaga kompetensi pemegang sertifikat PBJ ?

Berdasarkan data per 11 November 2021, jumlah pemegang sertifikat dasar sebanyak 307.823 orang. Lalu, data per 10 November 2021 menunjukkan jumlah pemegang sertifikat kompetensi okupasi sebanyak 192. Angka ini mencakup Pokja 112 orang, PP 33 orang, dan PPK 47 orang.

Upaya menjaga kompetensi pemegang sertifikat kompetensi PBJ dengan melakukan serveilan 1x dalam masa kepemilikan Sertifikat (masa berlaku Sertifikat kompetensi adalah 5 tahun).

Apa saja inovasi-inovasi yang telah dilakukan dalam menyelenggarakan pelatihan?

Inovasi yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan Pelatihan dan Pelayan Pusediklat antara lain MOOC PBJ Desa, MOOC Certificate Programme in Public Procurement, MOOC Bagi Pelaku Usaha Kecil, dan Knowledge Management System (KMS) PBJ. (*)



Sutan Suangkupon Lubis
Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan SDM LKPP



Bung Hatta dikenal sebagai pendiri bangsa yang berjiwa sederhana. Salah satu pemikirannya mengenai ekonomi kerakyatan menjadi dasar Koperasi Indonesia yang berasas kekeluargaan dan gotong royong



Bung Karno dan Bung Hatta dalam Munas di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur, No 56, tanggal 10-14 September 1957.

Mohammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama (1945-1956). Ia bersama Presiden Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamákannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Hak Asasi Manusia, dan Bapak Perumahan Nasional.

Dibalik besarnya perjuangan beliau untuk Indonesia, Bung Hatta adalah sosok yang sangat sederhana. Guntingan iklan sepatu Bally menjadi saksi bisu kesederhanaan seorang Muhammad Hatta. Tiada yang pernah membayangkan bahwa orang nomor dua di Republik ini tidak mampu membeli sepasang sepatu yang didambakannya, bahkan sampai akhir hayatnya.

Ternyata, gajinya sebagai seorang wakil presiden tak mampu membeli sepasang sepatu Bally, yang memang tergolong sepatu bermerek ketika itu. Mimpi Bung Hatta

MOHAMMAD HATTA **Kesederhanaan dan** **Pemikiran Pendiri Bangsa**

soal sepatu ini terungkap ketika guntingan iklan yang memuat alamat penjual sepatu itu ditemukan masih tersimpan rapi hingga Sang Proklamator wafat pada 1980.

Berkarya nyata

Salah satu karya monumental beliau adalah bentuk koperasi. Ketika pulang ke Hindia Belanda, ia melihat banyak koperasi tidak sesuai kaidah dengan yang dipelajarinya di Eropa dan pemikiran Taman Siswa Ki Hadjar Dewantoro. Ia banyak mengkritik koperasi yang hanya mencari keuntungan seperti paham kapitalisme.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, gagasan ekonomi koperasi Bung Hatta turut dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pasal 33 ayat 1 ini kemudian menjadi sendi dari politik perekonomian Indonesia. Di dalamnya tercantum bahwa dasar ekonomi nasional adalah usaha bersama di atas asas kekeluargaan. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental.

Dalam kongres Koperasi Indonesia di Bandung 17 Juli 1953 saat menerima gelar sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta menyampaikan sebuah pidato. Saat itu ia menekankan bahwa koperasi memiliki banyak manfaat dari sisi ekonomi dan demokrasi jika dikembangkan sesuai prinsip kekeluargaan. (*)



Menjaga Kondisi Tetap Sehat di Kala Pandemi Covid-19



Menyambut tahun 2022, masyarakat Indonesia masih harus tinggal dalam kekhawatiran diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

Sejalan dengan itu, Pemerintah terus memberikan upaya terbaik melalui program vaksinasi nasional dengan target cakupan 208.265.720 orang. Hal ini guna memberikan perlindungan kesehatan, menghentikan laju transmisi atau penularan Covid-19, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional terdampak pandemi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat sehingga masyarakat tidak perlu risau.

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. Mengingat penularan

Covid-19 terjadi karena *droplet infection* dari individu ke individu baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, dan tempat lain dimana orang berinteraksi sosial.

Pemerintah rasanya tak pernah bosan mengingatkan masyarakat dengan mengeluarkan sejumlah himbauan untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Masyarakat juga diminta untuk melakukan pembatasan jarak (*social-physical distancing*) serta tidak melakukan aktivitas diluar ruang jika tidak mendesak.

Untuk mendukung hal tersebut, lantas langkah apa saja yang dapat Sobat Kredibel praktikkan agar menjaga kondisi tubuh

tetap sehat di kala pandemi Covid-19 sehingga terhindar dari serangan virus dan bakteri?

Dimulai kesadaran tentang pentingnya menjaga imunitas tubuh dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, tidak merokok dan menjauhi minuman beralkohol. Selain itu, pastikan istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik, disarankan juga untuk selektif dalam menerima informasi demi menjaga kesehatan mental dan psikososial. Berkebun, memasak makanan favorit, membaca buku, mendengarkan musik, dan menonton film dapat menjadi pilihan tepat bagi Sobat dalam mengisi sela-sela kegiatan di kala Pandemi Covid-19. (*)



ETALASE



UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang terdampak krisis pandemi, yuk kita bantu pelaku UMKM melewati pandemi dengan membeli produk yang ditawarkan



CHOIPAN

Salah satu kuliner khas Indonesia yang berasal dari Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Selain disebut Choipan, masyarakat kerap juga menamakannya chaikueyang merupakan jajanan terkenal bagi berbagai kalangan di Singkawang.

jajanan ini memiliki ciri kulit yang kenyal, bahan dasarnya terbuat dari tepung beras dan tepung sagu, lalu diisi oleh bengoang yang dicampur ebi atau daun kucai. Teksturnya tipis dan lembut biasanya dihidangkan dengan siraman sambal cuka

BELA PENGADAAN

TOKO DARING

KOPI

Kopi telah dikenal sejak abad ke 9, awalnya biji kopi hanya dikenal oleh bangsa Ethiopia yang ditanam pada dataran tinggi. Seiring dengan ekspansi perdagangan bangsa Arab maka biji kopi pun telah meluas hingga Afrika Utara dan ditanam secara massal.

Indonesia merupakan negara produsen biji kopi terbesar keempat di dunia. Dengan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang awalnya dikenal sebagai produsen kopi, saat ini Indonesia perlahan berkembang menjadi negara konsumen kopi.





ETALASE



LKPP mendukung peningkatan peluang dan daya saing Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaku usaha dapat menjual produknya melalui Program Bela Pengadaan dan Toko Daring.



Madu

Madu telah dikenal manusia sejak 8000 tahun sebelum masehi. Madu memiliki keunggulan dengan kandungan antioksidan sehat, asam amino dan vitamin. Makanan ini berasal dari sekresi sekresi gula tumbuhan (nektar bunga) atau dari sekresi serangga lain (seperti honeydew atau madu serangga). Madu juga memiliki sifat osmotik yang berarti madu menjadi media yang tidak bagus untuk mikroorganisme berkembang biak.

BELA PENGADAAN

TOKO DARING

Tas

Saat ini tas bukan hanya sebagai penunjang penampilan, namun dapat menunjukkan karakter dari seseorang yang memakainya. Seiring dengan perkembangan zaman berbagai macam bentuk tas bermunculan mulai dari tas selempang hingga tas ransel.

Oleh karena itu, tas memiliki potensi bisnis yang cukup besar untuk diproduksi oleh UMKM. Beberapa UMKM Indonesia telah berhasil menembus pasar Eropa dalam mengekspor produknya. Hal ini dapat menjadi semangat kepada para pengrajin tas lainnya agar terus melakukan inovasi dan pemasaran agar hasil karyanya dapat bersaing di dunia Internasional





LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



HUT

14

TH



#14THBERKONTRIBUSIUNTUKNEGERI